

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara ketiga dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Negara dengan penduduk yang padat tentu menghadapi permasalahan yang kompleks, salah satunya adalah permasalahan lingkungan hidup. Kesadaran terkait pentingnya mengelola hutan dan lahan untuk mempertahankan fungsi dan kegunaannya masih menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hutan dan lahan yang sejatinya membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sering kali dikelola dengan tidak tepat. Kurangnya wawasan dan tidak adanya dana yang turut menjadi kendala, sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk turun tangan pada pelaksanaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi Hutan menjelaskan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan mempunyai tujuan untuk memulihkan, meningkatkan maupun mempertahankan fungsi hutan dan lahan agar dapat meningkatkan daya dukung, produktivitas maupun peranannya dalam menjaga sistem kehidupan manusia. Pengelolaan hutan dan lahan sendiri dapat dilakukan dengan menanam beberapa jenis tumbuhan seperti menanamkan tanaman berkayu, buah-buahan, ataupun semusim guna membentuk interaksi ekologis dan ekonomis antara komponen penyusunnya.

Manfaat yang diberikan dari pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri yaitu menghasilkan oksigen yang berlimpah, mencegah terjadinya bencana alam, memperbaiki kualitas hidup masyarakat di sekitar. Dampak yang dirasakan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat terhadap kepedulian lingkungan sekitar. Namun, pelaksanaan dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri yang dilakukan tidak hanya bisa berasal dari pemerintah saja, hal tersebut membutuhkan adanya partisipasi masyarakat yang dapat membantu pemerintah guna menjadikan program yang dijalankan efektif.

Pemerintah tidak hanya merancang apa saja yang dibutuhkan oleh lingkungan untuk memperbaiki ekosistemnya, pihak pemerintah perlu bersinergi dengan masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Hal ini karena dampak yang dirasakan oleh seluruh pihak termasuk masyarakat itu sendiri. Pentingnya peran yang dimiliki masyarakat menjadikan pemerintah perlu mempertimbangkan segala aspek di dalam program guna dapat menjawab solusi bersama-sama dengan masyarakat.

Pemerintah perlu meninjau lahan-lahan kosong ke setiap daerah yang ada di Indonesia, sehingga mampu mengetahui potensi apa yang dapat diperoleh dari lahan-lahan yang masih belum dikelola secara maksimal. Pemerintah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Semarang sendiri telah melakukan peninjauan dan pencatatan terhadap luas hutan dan lahan yang tersebar di seluruh penjuru daerah. Setiap hutan maupun lahan memiliki potensinya yang turut diikuti dengan kekurangannya.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat data lahan hutan dari setiap kecamatan di Kabupaten Semarang, data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Luas Lahan Hutan Per-Kecamatan Kabupaten Semarang

No	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Getasan	6,570,00	6,580,00	6,580,00
2.	Tengaran	4,719,59	4,729,59	4,729,59
3.	Susukan	4,883,97	4,884,97	4,884,97
4.	Kaliwungu	3,994,61	3,995,61	3,995,61
5.	Suruh	6,400,85	6,401,85	6,401,85
6.	Pabelan	4,796,61	4,798,61	4,798,61
7.	Tuntang	5,613,20	5,622,20	5,622,20
8.	Banyubiru	5,440,07	5,441,07	5,441,07
9.	Jambu	5,161,04	5,163,04	5,163,04
10.	Sumowono	5,561,03	5,563,03	5,563,03
11.	Ambarawa	3,820,95	3,821,95	3,821,95
12.	Bandungan	4,821,20	4,822,20	4,822,20
13.	Bawen	4,657,34	4,659,34	4,659,34
14.	Bringin	3,593,86	3,593,86	3,593,86
15.	Bancak	4,383,60	4,384,60	4,384,60
16.	Pringapus	7,834,25	7,835,25	7,835,25
17.	Bergas	4,731,22	4,733,22	4,733,22
18.	Ungaran Barat	6,188,75	6,188,75	6,188,75
19.	Ungaran Timur	3,797,06	3,799,06	3,799,06

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022)

Berdasarkan tabel luas hutan yang ada di setiap kecamatan dari Kabupaten Semarang, ada satu kecamatan yang masih memiliki luas hutan yang minim yaitu Kecamatan Bringin. Jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain, Kecamatan Bringin hanya memiliki luas 3.593,86. Rendahnya lahan hijau di suatu daerah dapat memicu dampak baru baik untuk lingkungan ataupun masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Adapun data luas lahan kosong di Kabupaten Semarang yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2 Luas Lahan Kosong di Kabupaten Semarang

Tahun	Luas	Persentase
2019	9.468	10.03%
2020	9.643	9.8%
2021	10.151	9.3%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022)

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022, Menunjukkan bahwa lahan terbuka hijau di Provinsi Jawa Tengah seluas 21.735 ha, sementara luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sendiri seluas 32.801 ha. Luas wilayah dari Kabupaten Semarang sendiri mencapai 95.02 Ha dan sementara di Kecamatan Bringin luasnya mencapai 6.189 Ha, sementara pada luas lahan untuk hutan tanaman hanya mencapai 3.5 Ha.

Merujuk pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 Ayat 2 tentang Penataan Ruang, lahan ruang terbuka hijau (RTH) di suatu wilayah seharusnya mencapai 30% dari total

luas wilayah daerah yang mana terbagi menjadi RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. Fakta yang terdapat di lapangan, ditemukan jika Kecamatan Bringin terindikasi jauh dari kata ideal untuk mampu memenuhi kriteria yang tertuang dalam regulasi. Pemenuhan lahan dengan menanamkan pohon yang sesuai dengan potensinya dapat dituangkan dalam berbagai lingkup kawasan seperti di berbagai desa di dalam satu kecamatan.

Pembukaan lahan dan pembangunan di suatu daerah patut diimbangi dengan penanaman pohon guna dapat meminimalisir kerusakan yang dapat terjadi. Pelaksanaan pembukaan lahan yang mana mempunyai tujuan tersendiri baik kepentingan bersama ataupun pribadi menyebabkan masyarakat juga perlu memikirkan bagaimana cara memulihkan fungsi dan kegunaan semestinya suatu lahan yang telah ataupun tidak digunakan. Penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memulihkan keadaan lingkungan yang mana dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah.

Menurut Sastropetro (1986) mengemukakan jika partisipasi memiliki arti sebagai keterlibatan kelompok setempat yang secara aktif dalam melakukan pengambilan keputusan atas rencana yang ada. Definisi partisipasi masyarakat mengacu dari Goldsmith dan Blustain (1980, h. 119 dikutip dari Ndraha, 1990), menyatakan masyarakat mampu terdorong untuk terlibat apabila partisipasi yang dilakukan oleh organisasi yang telah dikenal dimana partisipasi tersebut mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang bersangkutan dengan artian mampu bisa memenuhi kepentingan dari masyarakat setempat serta pada disediakan kontrol yang terjamin bagi masyarakat.

Partisipasi masyarakat sendiri turut menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, sebab tidak selamanya pemerintah mampu memberikan solusi-solusi kepada persoalan yang hidup di tengah masyarakat, yang mana dapat menyebabkan pemerintah dikatakan lemah oleh publik. Ide-ide yang tertuang untuk solusi yang datang dari pemangku kepentingan pun sering tidak mampu menjawab persoalan yang dibutuhkan warga negara. Oleh sebab itu, masyarakat yang merupakan sumber daya bagi negara mempunyai turut andil dalam hak dan tanggung jawabnya mengetahui persoalan dan mampu berpartisipasi ke dalam pengelolaan publik secara efisien.

Keterlibatan masyarakat ke dalam persoalan publik adalah hal yang sangat penting guna menghindari ketidakefektifan dari prioritas yang dimiliki oleh pemerintah dan mampu mengembalikan jati diri dari akuntabilitas tujuan yang ingin dicapai. Menurut Carvalho et al., (2019), partisipasi warga negara yang berdedikasi adalah sebuah solusi yang berguna untuk dapat meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan dan implementasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan program-program yang dimiliki. Proses partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah suatu bentuk usaha dalam mendemokratisasi pengambilan keputusan pada sektor publik yang mana dampaknya dirasakan langsung oleh hal yang menjadi objek. Proses partisipasi bertujuan memberikan pengawasan dan meneliti bagaimana kinerja pihak pemangku kepentingan dimana masyarakat mampu menuntut perbaikan dalam kinerjanya.

Pemerintah melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDASHL Pemali Jratun Kota Semarang membentuk program yakni

program tersebut memerlukan partisipasi masyarakat di dalamnya. Tingkat partisipasi yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan program yang diselenggarakan sebab dapat memengaruhi bagaimana keberlangsungannya. Tidak hanya itu, dari partisipasi adapun beberapa bentuk jenis partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bringin pada saat melakukan rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri. Bentuk partisipasi yang dilakukan mempunyai peranan yang penting karena dapat memengaruhi kerja sama yang dilakukan dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDASHL Pemali Jratun Kota Semarang dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri.

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDASHL Pemali Jratun Kota Semarang sendiri adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah BPDASHL bertugas untuk melaksanakan pembentukan rencana, implementasi rehabilitasi dan lahan serta melakukan konversi terhadap tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, serta melaksanakan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung.

Merujuk pada tugas organisasi publik terkait, upaya rehabilitasi hutan dan lahan berguna untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga produktivitas dan daya dukung terhadap lahan sebagai sistem penyangga kehidupan dapat terjaga. Program dari BPDASHL Pemali Jartun turut bertujuan untuk menahan degradasi lahan maupun sedimentasi yang dapat mencapai 250 ton/km²/tahun (BPDASHL, 2022).

Berdasarkan perencanaan dan program yang dimiliki oleh BPDASHL, terdapat program kegiatan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri. Kegiatan penanaman rehabilitasi hutan dan lingkungan agroforestri merupakan program yang dimiliki oleh BPDASHL yaitu memberikan bibit pohon secara gratis kepada masyarakat dengan syarat utama adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkannya. BPDASHL tidak hanya memberikan bibit saja, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara berkelompok dalam menanam pohon sebagai bentuk upaya rehabilitasi hutan serta dari sisi BPDASHL dapat melakukan pemantauan secara berkala terhadap bibit yang telah diberikan kepada masyarakat.

Pemantauan yang dilakukan oleh BPDASHL tidak semata-mata agar bibit tersebut tidak dijual kembali oleh masyarakat, sebab pemerintah turut ingin membangun rasa peduli masyarakat terhadap lingkungan sekitar dengan mengingat bagaimana lahan yang efektif mempunyai daya tarik salah satunya jika meninjau dari aspek ekonomi yang berpotensi untuk menyejahterakan masyarakat sekitar dengan memanfaatkannya. Partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting terhadap keberlangsungan dari kelestarian lingkungan dengan terus mengelolanya secara berkelanjutan yakni salah satunya dengan melakukan rehabilitasi pada lahan.

Akibat yang dapat ditimbulkan dari kurangnya ruang terbuka hijau juga akan menyebabkan berbagai dampak yang tidak diharapkan seperti terjadinya banjir, tanah longsor, kurangnya kualitas mata air di sekitar pemukiman, tanah tidak subur dan lain-lain. Rasa acuh atas lingkungan sekitar perlu ditindaklanjuti bersama, tidak hanya dari program pemerintah saja tetapi masyarakat yang turut

andil berpartisipasi dan bersinergi bersama pemerintah dalam menghijaukan kembali lahan-lahan yang seharusnya digunakan dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam program penghijauan lingkungan sangat penting sebab masyarakat di daerah tersebutlah yang mengerti dan merasakan dampak dari minimnya lahan hijau di suatu daerah.

Program rehabilitasi hutan dan lahan yang mengunggulkan teknik agroforestri karena teknik ini dikenal sebagai solusi atas persoalan lingkungan seperti degradasi lahan yang menurunkan kualitas lahan, penggundulan hutan, pasokan cadangan air dan gas rumah kaca dalam jangka panjang serta masalah sosial seperti perekonomian masyarakat dalam lingkup agribisnis (Patel dan Moore, 2017). Menurut Dagar dan Tewari (2017:23) jika agroforestri memiliki karakteristik perpaduan dari agrikultur dan kehutanan. Hal ini diartikan bahwa agroforestri merupakan revolusi di bidang perkebunan melalui interaksi antara berbagai jenis tumbuhan dan sebagai bentuk upaya revolusi penggunaan lahan yang memanfaatkan jenis tumbuhan yang berbeda pada satu lahan.

Penggunaan teknik agroforestri sebagai salah satu upaya peningkatan daya fungsi lahan melalui penanaman tumbuhan dengan jenis yang berbeda dari satu dan lainnya. Menurut Jose (2009), agroforestri memberi manfaat kepada berbagai pihak seperti petani, lingkungan, meningkatnya perekonomian. Teknik agroforestri juga menawarkan perbaikan atas fungsi lahan dengan manfaat seperti meningkatkan tangkapan air hujan dan penyerapan karbon serta mengurangi potensi banjir, dan meningkatkan kesuburan lahan (Elevitch et al., 2018). Pada dasarnya, agroforestri memberi banyak keuntungan terutama pada keanekaragaman hayati karena menjadi

wadah baru dalam pengelolaan ekosistem dan membantu pembangunan serta konservasi.

Urgensi pemerintah dalam melakukan rehabilitasi lahan dengan teknik agroforestri harus selaras dengan keterbukaan informasi program yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini karena minimnya akses informasi dan keterbukaan terhadap program dapat menghambat masyarakat dalam mengetahui dan penerimaan informasi secara jelas dalam menjawab persoalan yang dimiliki. Penanaman pohon di lahan-lahan kosong tidak hanya memberikan manfaat kepada lingkungan, tetapi turut memberdayakan masyarakat di sekitar apabila masyarakat berhasil memanfaatkan bibit-bibit gratis yang diberikan oleh pemerintah, sehingga nilai ekonomi yang dimiliki dapat dirasakan secara berkelanjutan. Pemberdayaan yang dilakukan pun dapat berlangsung secara terus menerus sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan yang meningkatkan taraf perekonomian masyarakat tersebut. Manfaat tersebut bergantung kepada bagaimana aktif atau tidaknya masyarakat dalam melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Kecamatan Bringin bersama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun yang mana tidak sebatas manfaat untuk kepentingan pribadi saja, tetapi turut serta menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Berangkat dari adanya urgensi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait efektivitas program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang, diduga pengelolaan lahan di Kabupaten Semarang masih belum efektif sebagaimana terlihat dari beberapa masalah yaitu:

1. Masih banyak lahan kosong di Kabupaten Semarang yang belum dikelola oleh masyarakat karena belum mencapai 30% dari ketentuan akibat keterbatasan pengetahuan terkait pentingnya mengelola lahan dan biaya pelaksanaannya.
2. Keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi tentang program yang disalurkan oleh pemerintah sehingga berdampak pada tidak adaptasi masyarakat mengenai permasalahan pengelolaan hutan dan lahan kosong.
3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis pohon yang menghasilkan kemanfaatan ekonomi dari mengelola lahan kosong.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat efektivitas program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan sekaligus menambah jumlah penelitian dalam bidang Manajemen Publik, khususnya bagi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Pemali Jratun Kota Semarang dalam menjalankan program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Semarang terutama masyarakat dari Kecamatan Bringin guna menyadari pentingnya melakukan rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri demi menjaga dan melestarikan lingkungan.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan rekomendasi kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Pemali Jratun Kota Semarang dalam

pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang hasilnya mempunyai kesamaan terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang diteliti terkait rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Berikut penelitian terdahulu yang termuat melalui artikel jurnal.

Penelitian terdahulu dapat memberikan manfaat bagi penelitian terkait dengan efektivitas rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri guna mengetahui efektivitas dari suatu program yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Merujuk pada penelitian pertama yaitu penelitian terdahulu yang berjudul “Implikasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial Terhadap Swadaya Ekonomi Masyarakat alam Program Perhutanan Sosial” oleh Rima Gulam Sami pada tahun 2020. Dalam penelitian dijelaskan bahwa implikasi program yang diselenggarakan oleh Perhutanan Sosial mempunyai dampak yang positif dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di Nagari Latang. Hal ini terlihat dari usaha-usaha yang berdiri seperti pengelolaan kopi asam gelugur dan teh asam gelugur, teh asam kandis dengan adanya program dari pemerintah dan menunjukkan jika efektivitas program terlihat

dari efisiensi hutan kemasyarakatan yang telah dikelola dengan baik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah efektivitas program yang ditinjau dari lokus yang berbeda dan objek jenis tanaman yang dijadikan bahan penelitian.

Pada penelitian terdahulu selanjutnya juga dilakukan oleh Nur Sahada, Hariadi Kartohardjo dan Dudung Darusman dengan judul “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Di Provinsi Riau” dimana di dalam penelitian ini dijelaskan jika efektivitas implementasi kebijakan dari pengelolaan Tahura Sultan Syarif Hasyim di Provinsi Riau masih membutuhkan perbaikan karena kepentingan masyarakat masih tidak selaras dengan isi kebijakan yang tertuang. Hal ini dinilai dari pola kejelasan kawasan, pola hubungan, dan peningkatan kesejahteraan dengan membentuk kelompok tani, serta mengubah pola pengelolaan hutan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun mempunyai dasar kebijakan yang jelas untuk melakukan pengelolaan lahan hutan dan membentuk kelompok tani yang memiliki tujuan agar mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di sekitar lahan dan lokus penelitian yang dilakukan turut berbeda.

Penelitian terdahulu lainnya adalah penelitian terdahulu dengan judul “Analisis Sosial dan Ekonomi Masyarakat Dalam Penerapan Pola Agroforestri Pada Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Desa Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut) yang dilakukan oleh Prayogo, Hamdan Fauzi, dan Dina Naemah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengelolaan lahan agroforestri menggunakan pola apikultur, pola agrosilvopastura dan pola agrisilvikultur. Berdasarkan dari 40

responden masyarakat dapat dinilai jika masyarakat menyukai pola pengelolaan ini meskipun belum memperoleh manfaat yang signifikan sebab masih tahap awal pelaksanaan. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian ini adalah lokus penelitian yang dilakukan di Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang akan tetapi menggunakan pola yang sama yakni pola apikultur yang mengombinasikan pohon-pohon yang ditanam sebagai sumber pakan lebah madu dengan tanaman pohon kayu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winit Pharcharuen, Phramaha Weerasak Suramati, Phrakhrusutaworathammakit, Phrakhruwinaithornwarawut Mahawaro, dan Sukanda Chantawaree berjudul “Community Participation in Sustainable Management of Community Forests: Case Study Ban Mae Hong Khrai, Mae Pong Sub-District, Doi Saket District, Chiang Mai Province.” dimana dalam penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat ketika mengelola hutan masih rendah meskipun di dalam kesehariannya memanfaatkan hasil dari hutan rakyat sebagai sumber pangan dan mendapatkan penghasilan tambahan serta menjadikan hutan untuk sarana ekowisata. Berdasarkan dari rendahnya partisipasi masyarakat tersebut menjadikan penelitian ini menyarankan untuk menggunakan dua bentuk pengelolaan yaitu pengelolaan hutan rakyat dengan metode tradisional dan pengelolaan hutan rakyat dengan metode pembangunan serbaguna.

Hal ini masih mengalami kendala karena masih belum terbentuk kelompok tani yang terdiri dari pengurus hutan kemasyarakatan, anggota masyarakat dan dukungan dari pemangku kebijakan. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah di Kecamatan Bringin telah membentuk kelompok tani yang difungsikan

sebagai pihak pengelolaan dan penanggung jawab dari pengelolaan lahan agroforestri dengan nama kelompok “Mandiri Jaya I”.

Penelitian terdahulu dengan judul “*What Makes Agroforestry a Potential Restoration Measure in a Degraded Conservation Forest*” yang dilakukan oleh Murniati, Sri Suharti, Minarningsih, Hani Sitti Nuroniah, Subektri Rahayu, dan Sonya Dewi. Metode agroforestri dinilai sebagai salah satu metode untuk mengatasi degradasi hutan dan melakukan restorasi hutan yang terjadi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. Hal ini bertujuan untuk dapat mengakomodasi ekologi dan ekonomi.

Pola yang dipilih dalam melakukan metode agroforestri adalah multikultur dengan bekerja sama dengan kelompok tani. Pemilihan sistem ini disukai karena terdapat keanekaragaman tanaman seperti kakao, durian, petai, dan kemiri. Dampak yang dihasilkan positif karena agroforestri berperan menjaga kuantitas dan kualitas air dari musim kemarau, meningkatkan sosial ekonomi masyarakat melalui produksi tanaman pangan, pendapatan tunai serta keterampilan masyarakat dalam mengelola lahan. Hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis tanaman yang digunakan pada saat pelaksanaan pengelolaan agroforestri di Desa Nyemoh yaitu balsa, nangka, petai, mangga, alpukat dan indigofera.

Penelitian terdahulu penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ikmal Saleh dan Rahmat Ariandi yang berjudul “Model Agroforestri yang Diterapkan Kelompok Tani Hutan (KTH) Berbasis Agribisnis di Desa Ulusaddang Kabupaten Pinrang”.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) di Dsa Ulusaddang menggunakan beberapa pola agroforestri dalam pengelolaan lahannya yaitu: (1) KTH Sipatuo yang menggunakan agrosilvopastoral, agrosilvofishery, agrosilvikulture, dan monokultur; (2) KTH Chulande Sipatuo yang menerapkan pola agrisilvikultur. Berdasarkan dari pola agroforestri yang digunakan, yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan pola apikultur dan lokus yang berbeda yaitu di Desa Nyemoh.

Pada penelitian terdahulu yang selanjutnya berjudul “Kontribusi Tanaman Agroforestri terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Petan” yang dilakukan oleh Wanderi, Rommy Qurniati, dan Hari Kaskoyo. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Dalam penelitian ini menggunakan sistem agroforestri dengan jenis tanaman utama adalah pisang, kakao, sengon, cengkeh dan pinang yang dikombinasikan dengan jenis tanaman pengisi seperti cengkeh, durian, kemiri, cabai, jengkol, petai, alpukat, duku, sukun, aren, nangka, rambutan dan lain-lain. Tanaman yang menjadi jenis utama dipilih karena hasil panen dapat dirasakan dalam waktu yang singkat, maka dari itu komposisi lahan dibagi ke dalam 7 jenis komposisi tanaman dengan pendapatan terbesar dari komposisi tanaman kedua. Pada sistem ini mengombinasikan tanaman jagung dan kakao sebagai tanaman utama dengan tanaman pengisi seperti cengkeh, cabai, sirsak, mangga, rambutan, durian, petai, kelapa, kemiri, pinang, bayur, duku, jengkol, alpukat, pala, sukun, aren dan cempa, Pendapatan yang diterima sebesar RP. 21.640.77/KK/Tahun dengan tingkat sejahtera sebesar 98% terdiri dari 88 orang. Hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah kelompok tani

hutan “Mandiri Jaya I” hanya menggunakan satu komposisi saja pada penerapan sistem agroforestrinya.

Penelitian terdahulu lainnya bertajuk “Keanekaragaman Spesies Dalam Sistem Agroforestri Di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah” dimana penelitian ini dilakukan oleh Efri Roziaty dan Yunitisia Pristiwi dimana penelitian ini menemukan jenis vegetasi yang digunakan pada sistem agroforestri di Desa Surajaya sebanyak 19 jenis vegetasi tanaman yang berbeda dimana di bagi ke dalam 12 famili. Pada penelitian ini turut dijelaskan bahwa diadakannya dari agroforestri dengan pembukaan lahan baru dapat mengakibatkan kerusakan tetapi karena di Desa Surajaya melaksanakannya dengan tahapan-tahapan yang tepat maka deforestasi tidak menimbulkan efek samping yang dapat menimbulkan kerusakan alam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penggunaan jenis vegetasi yang hanya menggunakan 1 jenis vegetasi tanaman di dalam satu lahan.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Ossi I. Ollinaho dan Markus Kroger dengan judul “*Agroforestry transition: The good, the bad and the ugly*” yang mana penelitian ini membahas bahwa transisi agroforestri memiliki efek samping yang cukup signifikan apabila tidak dapat diimbangi dengan pengelolaan yang tepat. Hal ini dijelaskan penggunaan lahan harus memperhitungkan kebutuhan lahannya agar produktivitasnya tidak mengalami penurunan yang akan merugikan petani dalam jangka panjang. Salah satunya adalah sistem agroforestri modern yang melakukan deforestasi dengan penggundulan atau pembakaran hutan sebagai tahap awal dari pembukaan lahan. Perbedaan yang ditemukan dari penelitian terdahulu

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sistem pembukaan lahan yang tidak merugikan lahan maupun masyarakat sekitar dimana penanaman dilakukan pada lahan yang telah lama kosong.

Penelitian terdahulu yang terakhir berjudul “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Resort Terhadap Perekonomian Desa (Studi Kasus di RPH Hulu Kapuas UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur) yang dilakukan oleh Euis Herawati, Emi Roslinda, Dwi Astuti dimana di dalam penelitian ini membandingkan program-program yang dibuat oleh pemerintah dan yang berjalan dengan efektif dan memberikan dampak adalah kegiatan Rekrutmen Brigade Dalkarhutla dan Pamhut jika dibandingkan dengan pemberian bibit gratis, budidaya madu kelulut dan budidaya ikan nila. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun hanya berfokus pada satu program yaitu Pembagian Bibit Gratis kepada masyarakat Kecamatan Bringin.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sami, R. G., 2020	Implikasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di Nagari Latang.	Kualitatif deskriptif.	Implikasi program pemerintah memberikan dampak positif yang nyata pada bidang ekonomi bagi masyarakat Nagari Lantang yang mana menciptakan usaha baru seperti pengelolaan the asam gelugur, pengelolaan madu, dan kopi asam gelugur.
2.	Suhada N; Kartodihardjo H; Darusman D, 2019	Fokus kajian berupa penyusunan strategi guna meningkatkan kebijakan pengelolaan taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim.	Kualitatif deskriptif.	Hasil implementasi kebijakan pengelolaan Tahura Sultan Syarif Hasyim tidak efektif akibat terjadi penyimpangan sehingga tujuan untuk menyejahterakan masyarakat tidak dapat tercapai.

3.	Prayogo; Fauzi H; Naemah D, 2020	Menganalisis dan menjelaskan dampak ekonomi dan sosial masyarakat pada pengelolaan agroforestri di hutan kemasyarakatan Desa Tebing Siring.	Kualitatif deskriptif.	Pengelolaan agroforestri dengan teknik apikultur yang memadukan berbagai jenis tanaman kayu dan buah disukai oleh masyarakat. Hasil dari pengelolaan ini masih belum memberikan dampak signifikan.
4.	Pharcharuen Winit; Suramati Phramaha; Chantawaree Sukanda, 2021	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan.	Kualitatif deskriptif.	Partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan masih rendah ditinjau dari memanfaatkan Kawasan hutan Ban Mae Hong Krai tanpa diimbangi oleh pelestarian yang memadai.
5.	Murniati; Suharti S; Minarningsih; N, Sitti H; dkk, 2022	Penelitian ini bertujuan untuk memahami regulasi terkait manajemen konservasi hutan dan menginvestigasi perilaku masyarakat dalam melaksanakan sistem agroforestri.	Kuantitatif deskriptif.	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan agroforestri tergolong baik dengan dampak sosial-ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk melaksanakannya.

6.	Saleh, M; Ariandi R, 2023	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model yang digunakan pada implementasi model agroforestri yang diterapkan oleh kelompok tani di Desa Uluaddang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.	Kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian menjelaskan bahwa masing-masing kelompok tani menggunakan pola yang berbeda seperti agrosilvikultur, agrosilvofishery, agrodihvopastoral, dan mono kultur.
7.	Wanderi; Qurniati, R; Kaskoyo, H; 2019	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi tanaman yang digunakan pada penerapan agroforestri yang memberikan pendapatan dan taraf kesejahteraan tertinggi untuk kelompok tani.	Kualitatif deskriptif	Komposisi tanaman yang digunakan pada sistem agroforestri terdapat tujuh (7) jenis tanaman dengan tanaman utama yaitu pisang dan kakao. Pendapatan tertinggi diperoleh dari komposisi II dan tergolong sejahtera dibandingkan komposisi lainnya.
8.	Roziaty, E; Prastiwi, Y, 2020	Mengetahui keanekaragaman jenis vegetasi yang ada di Desa Surajaya dengan melakukan teknik agroforestri.	Kualitatif eksploratif	Berdasarkan penelitian bahwa ditemukan 19 jenis vegetasi tanaman yang berbeda terdiri dari hortikultura dan non hortikultura yang mana lahan penggunaannya sebanyak 287,89 ha.

9.	Olimaho, O, I.; Köger, M, 2021	Mengkaji tentang definisi dan kerangka agroforestri yang mana diidentifikasi dari sisi politik dan ekonomi yang terdiri atas tiga unsur yaitu agroekologi, agribisnis, dan degradasi hutan.	Kualitatif analisis deskriptif	Agroforestri memiliki tiga transisi yaitu agroekologi skala kecil, pertanian konvensional skala besar, dan ekspansi monokultur. Hal ini menunjukkan bahwa praktik agroforestri di setiap negara memiliki cara yang berbeda.
10.	Herawati, E; Roslinda, E; Astiani, D, 2022	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat berbasis resort terhadap perekonomian desa di RPH Hulu Kapuas UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur	Kuantitatif	Pemberdayaan masyarakat di RPH Hulu Kapuas yang efektif adalah program rekrutmen brigade dalkahurtla dan pamhut dibandingkan dengan pemberian bibit gratis, budidaya madu dan budidaya ikan. Hal ini karena program yang efektif memiliki perubahan yang nyata pada masyarakat.

Sumber jurnal yang telah diolah: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, hal yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada penelitian ini yaitu peneliti ingin mengukur bagaimana efektivitas dari suatu program yang dilakukan oleh organisasi publik yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun

Kota Semarang Bersama dengan kelompok tani KTH Mandiri Jaya I. Program yang dilaksanakan dikenal dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan teknik agroforestri. Peneliti juga akan menganalisis apakah program rehabilitasi hutan dan lahan dengan teknik agroforestri ini efektif dalam memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat atau bahkan berbanding balik dengan menggunakan kajian ilmu administrasi publik sebagai berikut.

1.6.2 Administrasi Publik

Kata administrasi bermula dari bahasa Yunani dengan terdiri dari dua kata yaitu “*ad*” yang berarti intensif dan “*ministare*” yang berarti melayani. Merujuk dari kata tersebut, administrasi merupakan melayani atau membantu dengan intensif. Definisi administrasi sendiri dikategorikan menjadi dua kategori yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi disebut sebagai pekerjaan mencatat, tulis-menulis atau dikenal pula sebagai aktivitas tata usaha. Arti luas dari kata administrasi yakni sebuah tahapan kerja sama secara rasional yang dilakukan suatu kelompok orang demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Makna lain dari kata publik yakni mempunyai arti umum, negara dan masyarakat.

Menurut Jefklins (2004), menyatakan jika publik dijelaskan sebagai sekumpulan orang yang berkomunikasi dengan organisasi baik secara internal ataupun eksternal. Pendapat lain mengenai publik yaitu dijelaskan oleh Ruslan (1997), menyatakan bahwa publik memiliki pengertian sempit dan spesifik yang berarti sekumpulan individu yang terikat pada suatu ikatan solidaritas. Apabila

ditarik kesimpulan dari penjabaran mengenai administrasi publik, maka merupakan sebuah organisasi yang terbentuk karena adanya masyarakat dengan bertujuan untuk mengatur dan mencapai tujuan dari pemerintahan.

Menurut pendapat Dwight Waldo dalam (Marom, 2014), menjelaskan bahwa fokus dasar dari administrasi publik terbagi menjadi 2, yakni:

1. Administrasi publik adalah sebuah organisasi dan manajemen yang dibentuk oleh sekelompok individu dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pemerintahan.
2. Administrasi publik merupakan sebuah ilmu dan seni manajemen demi mengatur berbagai urusan pemerintahan atau negara.

Meninjau dari fokus tersebut, Waldo berpendapat jika organisasi adalah struktur yang terdapat dalam administrasi maupun manajemen merupakan aspek yang menggambarkan tentang fungsi dan organisasi sehingga bisa dikatakan bahwa kedua hal ini bergantung satu sama lain demi menunjang keberhasilan dari sebuah organisasi. Selanjutnya, menurut Yeremias T. Keban dalam bukunya yakni Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik menjelaskan jika administrasi publik bisa dilakukan melalui peninjauan enam dimensi strategis, seperti:

1. Dimensi Kebijakan

Dimensi kebijakan berhubungan dengan tahapan penyusunan keputusan guna menentukan target dan cara dalam mencapai tujuan.

2. Dimensi Struktur Organisasi

Dimensi struktur organisasi merupakan pengaturan struktur di dalam organisasi yang mencakup pembentukan unit kerja dan pembagian tugas.

3. Dimensi Manajemen

Dimensi manajemen merupakan proses mengatur tugas yang telah dibentuk guna mampu berjalan dengan lancar.

4. Dimensi Etika

Dimensi etika berisikan batasan moral yang dimiliki oleh para administrator terkait tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

5. Dimensi Lingkungan

Dimensi lingkungan menjelaskan suasana yang memengaruhi semua dimensi yang ada.

6. Dimensi Akuntabilitas Kinerja

Dimensi ini menjelaskan tentang tanggung jawab dari para administrator baik tentang kehadiran dan kegunaan dalam melakukan pelayanan.

Apabila meninjau dari keenam dimensi tersebut, seluruh dimensi yang disebutkan memiliki keterkaitan dan tidak bisa untuk dipisahkan karena demi menciptakan administrasi publik yang sesuai dan maksimal dengan tujuan yang diharapkan. Merujuk dari hal itu, demi mencapai kinerja yang maksimal dalam suatu organisasi diperlukan penerapan keenam dimensi secara bersamaan.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Paradigma ini dikenal dengan nama paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Mengacu pada Makassar (2013), kemunculan paradigma ini diawali dengan terbitnya buku milik Frank J. Goodnow (1900) dan Leonard D. White (1926) yang berjudul *Politics and Administration* melalui bukunya, beliau menjelaskan bahwa ada 2 fungsi negara dan organ-organnya, yakni politik dan administrasi. Peran politik sendiri berhubungan dengan kebijakan, sedangkan administrasi berhubungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal yang ditegaskan dalam paradigma ini merupakan lokus yang berisi dimana administrasi publik harus berada tanpa menyertakan fokusnya.

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma kedua dikenal dengan paradigma Prinsip-prinsip Administrasi. Dalam paradigma ini, tokoh-tokoh terkenal seperti Willoughby, Gullick & Urwick yang pemikirannya telah terpengaruhi oleh teori manajemen klasik milik Fayol dan Taylor. Melalui dua tokoh yakni Fayol dan Taylor, beliau memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi publik yang berisi *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting* (POSDCORB). Berlandaskan dari seluruh prinsip yang disebutkan, beliau menyebutkan bahwa prinsip ini bersifat universal sehingga dalam lokusnya bisa diimplementasikan dimana saja. Selain itu,

hal yang ditegaskan pada paradigma ini yaitu terhadap fokus dari administrasi publik akan tetapi lokusnya cenderung universal.

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Paradigma ini dikenal dengan paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Paradigma ketiga ini terbentuk karena terdapat banyak kritikan terkait dengan paradigma sebelumnya. Sehingga dalam paradigma ini, kedudukan administrasi publik diposisikan lagi ke awal mula yakni pada ilmu politik. Selain itu, paradigma ini berupaya agar dapat menjalin hubungan melalui menelaah kembali konseptual dari administrasi publik dan ilmu politik itu sendiri.

4. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma ini dikenal dengan Administrasi sebagai Ilmu Administrasi. Hal yang melatarbelakangi adalah para tokoh dari administrasi publik melihat jika administrasi publik kurang dilirik akibat berada di dalam bidang ilmu politik. Dengan demikian para tokoh mencari alternatif untuk menjadikan administrasi publik sebagai ilmu. Lalu, paradigma ini lebih menekankan terhadap fokus sehingga lokus memiliki prinsip yang sama dengan paradigma kedua yakni administrasi bersifat universal.

5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-1990)

Paradigma ini dikenal dengan Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Pada paradigma kelima ini telah mempunyai lokus dan fokus yang tegas dari paradigma sebelumnya. Hal ini ditinjau dari fokusnya pada teori manajemen, teori organisasi, serta kebijakan publik. Sementara

lokusnya merupakan persoalan maupun hal yang menjadi kepentingan publik.

6. Paradigma *Governance* (1990-Sekarang)

Paradigma ini dikenal dengan *Governance* dimana menjadi paradigma yang terbaru dalam perkembangan ilmu administrasi publik yang sistematis terhadap rangkaian paradigma yang telah dijelaskan sebelumnya. Melalui buku yang berjudul “Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi *Good Governance*” yang ditulis oleh Pandji Santosa menjelaskan bahwa pilar dalam paradigma ini mencakup pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Hal ini yang menjadikan perbedaan diantara paradigma sebelumnya. Selanjutnya, penjelasan terkait *government* yang merupakan sebagai penyelenggara pemerintahan. Adanya pergantian dari implementasi *government* menjadi *governance* dengan menjelaskan tentang gabungan dari stabilitas pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat. Dalam paradigma ini mengacu kepada pemerintahan yang baik atau dikenal dengan *governance*.

Berdasarkan keenam paradigma dalam administrasi publik, penelitian yang peneliti lakukan selaras dengan paradigma kelima dari administrasi publik sebagaimana administrasi publik mempunyai fokus pada manajemen publik dan kebijakan publik. Peneliti akan mengkaji bagaimana pemerintah mengimplementasikan program dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.

1.6.4 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah hasil analisis yang intensif terhadap alternatif-alternatif yang ada dan berakhir pada sebuah keputusan hingga memilih alternatif terbaik. Beberapa alternatif yang ada dipilih berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu (Pasolong, 2020). Pada umumnya, kebijakan publik merupakan bentuk keputusan pemerintahan dengan tujuan menata kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan cara memilih suatu tindakan atau tidak memilih tindakan apa pun agar dapat membentuk ketertiban dan kesejahteraan khalayak masyarakat. Menurut Chandler dan Plano juga berpendapat bahwa kebijakan publik sebagai investasi yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan orang-orang yang mempunyai kekuatan lemah di tengah masyarakat guna mereka mampu hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Sementara menurut Dye dalam Darmawan & Adiwidjaja (2019), kebijakan publik adalah sebagai seluruh aktivitas yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah.

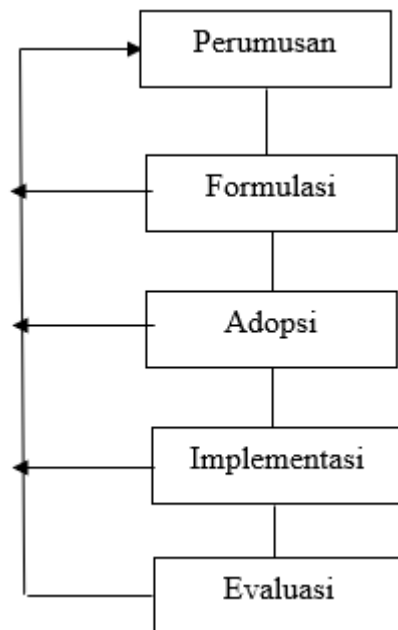
Kebijakan publik merupakan suatu aspek tertentu dari adanya beberapa perilaku pemerintah sebagai topik telaah perbandingan serta telaah yang kritis, yang mana tindakan dan prinsip-prinsip berbeda, serta menganalisis secara teliti peluang korelasi yang timbul dari sebab dan akibat dalam suatu konteks disiplin berpikir seperti ekonomi, politik, dan sains. Thomas R. Dye dalam Wahab (2011) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan atau pilihan pemerintah yang berkaitan dengan pilihan apa pun yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik yang bertujuan melakukan sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Lebih lanjut,

Enderson dalam Islamy (2000) menyatakan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah, serta kemudian timbul implikasi turunan dari definisi kebijakan menurut Enderson, yaitu:

- a. Kebijakan publik berkiblat pada tujuan dan mempunyai tujuan serta maksud tertentu.
- b. Kebijakan menyediakan perilaku atau motif perilaku dari pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah hal-hal yang dilaksanakan oleh pemerintah, bukan suatu hal yang apa pemerintah maksud akan pelaksanaan sesuatu maupun menyatakan akan melakukan sesuatu.
- d. Kebijakan publik memiliki sifat konkret yang diartikan berupa perilaku pemerintah berkaitan dengan persoalan tertentu atau yang bersifat negatif dalam artian keputusan pejabat pemerintah guna tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan pemerintah mempunyai arti positif, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Menurut Chaizi Nauscha (2004:37) menjelaskan kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah pada pembuatan suatu kebijakan yang digunakan di dalam perangkat hukum dan memiliki tujuan agar dapat mengatasi dinamika sosial yang tumbuh di tengah masyarakat, serta menjadi landasan acuan perumusan kebijakan guna terbentuk hubungan sosial yang harmonis. Pada proses kebijakan publik dibutuhkan suatu tahapan yang kompleks sebab terdapat banyak penggunaan variabel yang mendukung kebijakan yang akan ditentukan. Salah satu

ahli yang melakukan kajian untuk menentukan tahapan proses kebijakan adalah William N Dunn (2004) yaitu:



Gambar 1.1 Tahapan proses kebijakan William N. Dunn

Sumber: William N Dunn (2004)

1) Tahapan penyusunan agenda

Pada proses ini dilakukan pembentukan kebijakan publik yang meliputi rangkaian proses guna menentukan persoalan publik yang menjadi urgensi untuk diselesaikan atau dicarikan solusinya. Proses ini merupakan hal yang penting karena perlu diawali dengan perumusan masalah yang tepat. Dalam fase ini turut mencakup empat tahapan yakni pencarian persoalan mendefinisikan persoalan, spesifikasi persoalan, dan pengenalan persoalan.

2) Tahapan formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan berisikan serangkaian aksi yang dapat menentukan kemungkinan kebijakan apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu persoalan publik. Dalam tahapan ini terdapat teknik peramalan yang mana menurut William N. Dunn merupakan proses yang bertujuan untuk menyusun informasi yang sifatnya faktual terkait kondisi sosial di masa depan mengacu kepada informasi yang telah tertera pada masalah kebijakan. Bentuk masa depan ini turut dibagi menjadi ke dalam tiga bagian yakni masa depan potensial, masa depan yang masuk akal, dan masa depan normatif.

3) Tahapan adopsi kebijakan

Adopsi kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian aksi menentukan pilihan formulasi yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah publik. Dalam tahapan ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan.

4) Tahapan implementasi kebijakan

Pada tahapan ini merupakan aksi lanjutan dari formulasi kebijakan yang telah dipilih pada tahapan formulasi kebijakan. Adapun dua unsur yang ditelaah yakni tata laksana hukum dan variabel budaya hukum. Pada tahapan implementasi turut dilakukan proses pemantauan yaitu sebagai sumber informasi utama dalam implementasi kebijakan.

5) Tahapan evaluasi kebijakan

Dalam tahapan ini merupakan aksi penilaian dari proses implementasi kebijakan. Evaluasi berkaitan dengan produksi informasi yaitu berisikan

nilai dari hasil kebijakan. Pelaksanaan evaluasi berguna untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan akurat, sehingga dapat menilai seberapa jauh pemenuhan nilai yang dapat dicapai dalam implementasi kebijakan.

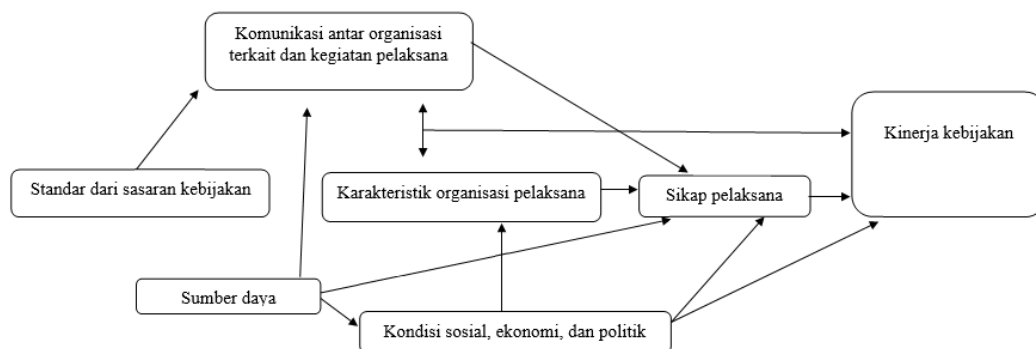
Menurut Riant Nugroho (2012:674) menjelaskan bahwa langkah kebijakan publik ke dalam dua tahapan yaitu kebijakan langsung yang dilakukan dalam bentuk program atau formulasi kebijakan *derivate*. Kebijakan publik secara umum masih berisikan pertanyaan-pertanyaan umum seperti apa tujuan, sasaran, dan berbagai macam sarana yang dituangkan ke dalam program-program demi mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut. Proses dari menuangkan program tersebut dilaksanakan melalui implementasi kebijakan. Pelaksanaan implementasi kebijakan tidak hanya tanggung jawab dalam bidang administratif akan tetapi menyangkut koneksi kekuatan politik, sosial dan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung dimana mampu memengaruhi perilaku seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

Implementasi kebijakan merupakan bentuk proses pelaksanaan yang dilakukan setelah sebuah kebijakan ditetapkan. Tahapan implementasi digunakan sebagai tolok ukur dari berhasil atau tidak suatu program. Menurut Edward III (Kadji, 2015) menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu tahapan yang mampu memengaruhi berbagai aspek, sehingga masih terdapat kemungkinan kebijakan mengalami kegagalan meskipun pengambilan kebijakan dinilai telah tepat. Penjelasan lain mengenai implementasi kebijakan diungkapkan oleh Van Horn dan Van Meter yakni implementasi dikatakan sebagai upaya yang dilakukan

oleh pemerintah atau pejabat yang diarahkan agar dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan. Adapun pendapat dari Grindle (Tachjan, 2006) jika implementasi dimaknai sebagai sebuah rangkaian tindakan agar dapat menunjang program yang berlangsung mampu mencapai tujuannya, sehingga implementasi ini juga disebut sebagai implementasi program sebab kebijakan masih berwujudkan pernyataan yang berisikan sasaran, arah, dan sarana yang dibutuhkan perwujudannya ke dalam sebuah program. Menarik dari beberapa pendapat ahli, maka dapat dijelaskan jika implementasi adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh pemangku kebijakan atau dikenal implementor yang berguna untuk merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan, sebab suatu kebijakan tanpa diwujudkan ke dalam program maka tujuan yang tertera pada kebijakan tidak dapat dicapai.

Pada proses implementasi perlu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya, maka suatu implementasi perlu mengenal terlebih dahulu substansinya. Model implementasi kebijakan dikelompokkan menjadi beberapa model, yaitu:

1. Model Implementasi Kebijakan Van Van Meter dan Van Horn



Sumber: Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2016)

Gambar 1.2 Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn

Model yang dikenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) disebut dengan “*A model of the policy implementation process*”. Pada model ini dijelaskan jika suatu implementasi kebijakan beriringan dengan kebijakan publik, kinerja kebijakan publik, serta implementor. Variabel yang memengaruhi proses kebijakan publik yaitu: Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarnno 2007:158) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan

Kinerja dalam implementasi yang keberhasilannya dapat diukur jika sasaran dari kebijakan sesuai dengan realitas pelaksana kebijakan.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam proses implementasi kebijakan dan dapat menunjang keberlangsungan program.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

Faktor komunikasi antar organisasi sangat penting dalam pelaksanaan program karena kejelasan standar dalam kebijakan tidak akan efektif apabila komunikasi tidak terjalin dengan baik.

d. Karakteristik dari pelaksana

Karakteristik adalah hal yang krusial sebab implementasi program dipengaruhi oleh organisasi pelaksana terkait.

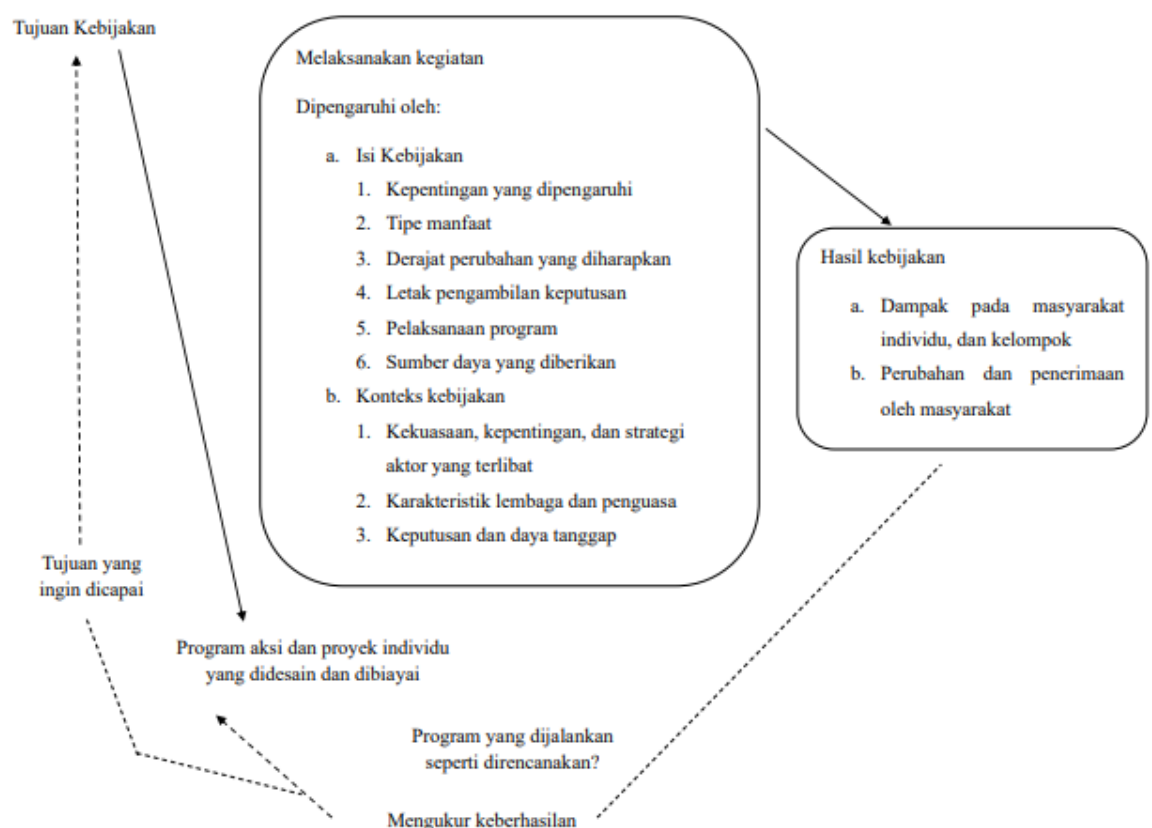
- e. Kondisi politik, sosial dan ekonomi

Tiga unsur ini harus dalam situasi kondusif sebab memiliki pengaruh proses dari keberlangsungan implementasi kebijakan.

- f. Kecenderungan dari pelaksana

Implementor harus dapat memahami tujuan dari kebijakan sehingga sikap yang dimiliki tidak menyimpang dari sistem yang telah ditetapkan dan mampu mencapai tujuan.

2. Model Implementasi Kebijakan Grindler



Gambar 1.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (1980) model ini menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan bergantung dengan rancangan kegiatan program yang telah

dibuat, ada pembiayaan yang cukup, pengaruh dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Pada isi kebijakan terdiri dari:

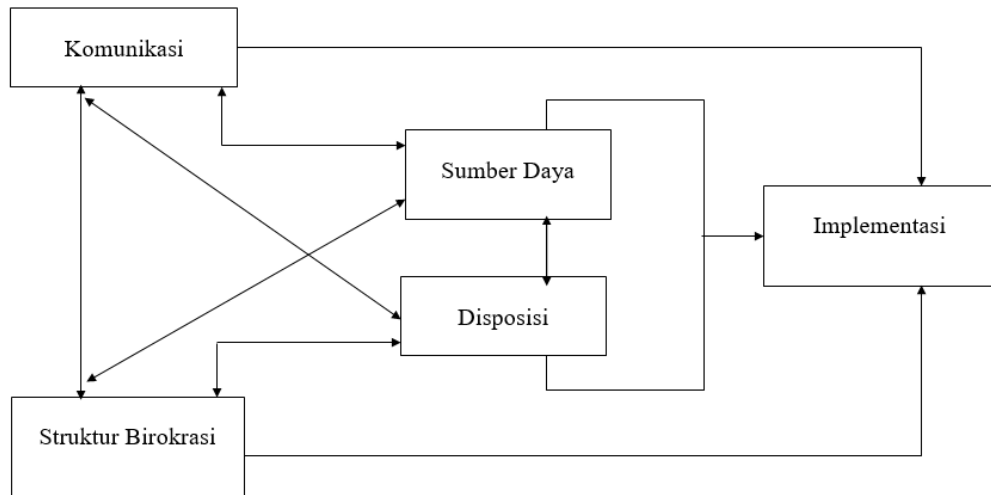
- a. Sumber daya yang dikerahkan
- b. Pelaksanaan program
- c. Kedudukan pembuat kebijakan
- d. Terdapat perubahan yang diharapkan
- e. Jenis dan manfaat yang dihasilkan
- f. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan

Sementara konteks implementasi mencakup:

- a. Kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepentingan strategi para pelaksana yang terlibat
- d. Kekuasaan

Merujuk pada model yang dijelaskan oleh Grindle, model implementasi kebijakan ini bersifat *top-down*, sehingga proses implementasi dipengaruhi dengan isi kebijakan yang menghendaki adanya perubahan besar, dipandang tidak memikirkan kepentingan rakyat, dan kebijakan yang kontroversial mendapat respons penolakan dari kelompok yang menjadi sasaran ataupun implementor yang menjalankan program terkait. Karakter implementor dapat memengaruhi proses implementasi sebab sikap implementor dapat berbeda dengan sistem yang ditetapkan di dalam kebijakan.

3. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward



Gambar 1.4 Model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward

Model ini berisikan struktur birokrasi disposisi, sumber daya, dan komunikasi. Model rumusan ini memiliki sifat *top-down*, sehingga keberhasilan implementasi mewajibkan para implementor mampu memahami tindakan yang perlu dilakukan. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi dijelaskan oleh George C. Edward III (dalam Sujianto 2008:38-45), yaitu:

- a. Komunikasi menjadi alat kebijakan yang berguna menyampaikan arahan dari pembuat kebijakan kepada mereka yang telah diberikan wewenang.
- b. Sumber daya sebagai faktor penting karena tanpa sumber daya yang memadai maka kebijakan dapat mengalami hambatan. Hal ini mencakup staf yang memiliki keahlian, informasi maupun fasilitas pendukung lainnya.
- c. Disposisi atau sikap pelaksana yang dilihat sebagai kemauan pelaksana dalam melakukan kebijakannya.
- d. Struktur Birokrasi adalah struktur kelembagaan dari pelaksana program yang terdapat dua unsur yaitu standar prosedur operasi dan fragmentasi.

Tabel 1.4 Faktor-faktor Implementasi Kebijakan

No	Van Meter dan Van Horn	Grindle	George C. Edward III
1.	Ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan	Isi Kebijakan	Komunikasi
2.	Sumber Daya	Konteks implementasi	Sumber Daya
3.	Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan.		Disposisi
4.	Karakteristik dari pelaksana		Struktur Birokrasi
5.	Kondisi politik, sosial dan ekonomi		
6.	Kecenderungan dari pelaksana		

Sumber: Jurnal yang telah diolah (2022, 2023)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Agroforestri adalah salah satu kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan guna memulihkan kembali fungsi hutan dan lahan milik pemerintah dan masyarakat serta menunjang perekonomian masyarakat sekitar dengan memanfaatkan hasil panen yang diperoleh dari pohon yang ditanam. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya pelestarian lingkungan dan alam serta menjaga kualitas air maupun tanah di sekitar hutan dan lahan. Penelitian ini termasuk ke dalam salah satu bentuk implementasi kebijakan publik. Pelaksanaan

implementasi dapat menentukan tingkat efektivitas suatu program sehingga dapat terukur berhasil atau tidaknya kebijakan yang telah dibuat. Pada penelitian ini, peneliti memilih tiga faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Isi Kebijakan
3. Sumber Daya

1.6.5 Efektivitas

1.6.5.1 Efektivitas

Efektivitas menurut Hidayat (1986) adalah efektivitas adalah suatu ukuran yang membawa seberapa jauh sasaran seperti kuantitas, kualitas, serta waktu yang telah tercapai. Hal ini dapat dikatakan efektivitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Seputra, 2020). Efektivitas turut dijelaskan oleh Wicaksono (2013:9) yang menyatakan bahwa efektivitas sebagai unsur dasar dalam mencapai tujuan dan sasaran yang mana telah ditetapkan sebelumnya baik di dalam organisasi, kegiatan, hingga program, dimana hal tersebut bisa dikatakan efektif jika tujuan maupun sasaran telah tercapai, sebagaimana yang telah ditentukan (Darmawan & Adiwidjaja, 2019).

Definisi terkait efektivitas turut dijelaskan oleh Abdurahmat (2003:92) yang menjelaskan bahwa efektivitas merupakan bentuk pemanfaatan sarana prasarana dan sumber daya dalam jumlah yang ditentukan demi menghasilkan pekerjaan yang tepat akan waktu. Tidak hanya itu, definisi dari efektivitas dijelaskan lebih lanjut oleh Prihartono (2012) melalui bukunya yakni menjelaskan bahwa efektivitas

sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran, yang mana hal tersebut diartikan sebagai situasi yang diharapkan sebelumnya.

Efektivitas menurut Ravianto (2014) adalah kegiatan yang dilakukan dan seberapa jauh kegiatan tersebut mampu menghasilkan keluaran yang diharapkan. Mengenai efektivitas juga dijelaskan oleh Strees (2011) yang mana efektivitas adalah skala atau jangkauan usaha dari sebuah program sebagai sistem dengan sumber daya maupun sarana tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tanpa melemahkan kaidah dan sumber daya, serta tanpa memberikan tekanan berlebihan pada pelaksanaan program tersebut.

1.6.5.2 Efektivitas Program

Pengertian terkait efektivitas program dijelaskan oleh Sutrisno (2007) yaitu efektivitas dikatakan sebagai langkah untuk mengukur sejauh mana suatu program mampu berjalan hingga mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini suatu program mampu dikatakan efektif jika tindakan yang dilaksanakan oleh aktor program telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Definisi lain tentang efektivitas program menurut Makmur (2015) yang mana dijelaskan bahwa efektivitas program merupakan pelaksanaan dari suatu program kerja yang menunjukkan adanya ketepatan antara pencapaian hasil yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh yang mana ditunjukkan dari ketepatan harapan, implementasi, serta hasil yang dicapai (Rahayuni & Rusli, 2021).

Efektivitas program menurut Campbell J.P (Mutiarin, 2014:97) dikatakan bahwa dilaksanakannya program melalui kemampuan operasional pada

pelaksanaan program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu dari hal tersebut, efektivitas program merupakan upaya dari keberhasilan sebuah program kerja yang mana mampu ditinjau dari segi proses kegiatan yang dilakukan di lapangan. Menurut Budiani (2007), dalam mengukur efektivitas program efektivitas dapat menggunakan unsur-unsur tertentu, yaitu:

1. Ketepatan Sasaran Program

Hal ini diartikan sebagai siapa saja yang menjadi peserta dan merasakan hasil dari pelaksanaan program adalah mereka yang telah ditentukan sebagai sasaran.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi program dikatakan sebagai kekuatan pelaksanaan program dalam mensosialisasikan informasi terkait program guna pelaksanaan dari kegiatan dapat tersalurkan dengan baik dan jelas kepada sasaran dari penerima program.

3. Tujuan Program

Tujuan program adalah sejauh mana ketepatan antara hasil program dengan tujuan awal yang ditetapkan.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan pekerjaan yang dilakukan setelah program telah dilaksanakan sebagai upaya perhatian pada peserta program.

Menurut Makmur (2011) pekerjaan yang dilaksanakan secara efektif yang mana pada proses pelaksanaannya menggunakan akurasi antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang ingin dicapai. Sementara pekerjaan yang tidak efektif

merupakan kegiatan yang menjumpai kesenjangan terkait harapan dan hasil yang ingin dicapai. Makmur (dalam Firmansyah dkk (2022) ditemukan delapan indikator pengukuran efektivitas program yang diuraikan sebagai berikut:

1) Ketepatan penentuan waktu

Kegiatan yang dilakukan dapat dibilang berhasil atau gagal apabila melalui ketepatan waktunya. Pemanfaatan waktu yang sesuai mampu menghasilkan program yang efektif demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2) Ketepatan perhitungan biaya

Ketepatan perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk memeriksa dan memastikan apakah pembiayaan yang digunakan pada pelaksanaan program tidak mengalami kelebihan ataupun kekurangan, sehingga dana bersifat efektif dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh program.

3) Ketepatan dalam pengukuran

Tolok ukur keberhasilan sebuah program sangat dibutuhkan dalam meninjau keberhasilan program demi mencapai tujuannya melalui standar yang ditentukan oleh pelaksanaannya.

4) Ketepatan dalam menentukan pilihan

Sebuah program mampu terlaksana dengan efektif ketika mencapai tujuannya jika pilihan yang ditentukan sudah sesuai dengan kebutuhannya.

5) Ketepatan berpikir

Ketepatan berpikir dapat menghasilkan perwujudan tujuan yang telah ditentukan guna program mampu mencapai tujuannya.

6) Ketepatan dalam melakukan perintah

Seorang pemimpin harus dapat memberikan perintah yang jelas, tepat, mudah dimengerti serta perintahnya dapat dipertanggungjawabkan guna para anggotanya mampu melakukan perintah dengan baik.

7) Ketepatan dalam menentukan tujuan

Tujuan dibutuhkan ketetapan sebelum program dilakukan guna mempermudah orientasi dari program secara jangka panjang.

8) Ketepatan sasaran

Penetapan kelompok sasaran yang menjadi target dari suatu program berdampak terhadap pencapaian tujuan yang ditentukan dan memiliki pengaruh atas efektivitasnya.

1.6.6 Efektivitas Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dilaksanakan merupakan suatu upaya dalam mencapai tujuan yang telah dibuat dalam kebijakan. Pencapaian tujuan ini juga selaras dengan efektivitas. Dunn (2003:429) menjelaskan mengenai bagaimana efektivitas berkenaan dengan suatu alternatif untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau diadakannya kegiatan. Efektivitas pelaksanaan kebijakan juga dijelaskan sebagai pengukuran terhadap tercapai atau tidaknya kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut Riant Nugrho (2012:707-710) mengemukakan bahwa terdapat lima tepat sebagai tolok ukur keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

a) Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan dapat diukur dari sejauh mana kebijakan mampu mengatasi persoalan yang terjadi. Selain itu, tepat kebijakan turut dapat menilai apakah suatu kebijakan yang ditentukan telah dirumuskan sesuai dengan karakter persoalan yang terjadi.

b) Tepat Pelaksanaan

Ada tiga aktor yang menjadi pelaku dari suatu program kebijakan yakni pemerintah, kerja sama pemerintah dengan masyarakat ataupun swasta, atau kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah turut memiliki sifat monopoli.

c) Tepat Target

Hal ini diartikan sebagai target yang diintervensi sesuai dengan apa yang direncanakan, tidak terjadi tumpang tindih serta tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Target yang ditentukan harus dalam situasi yang siap diintervensi dan intervensi program kebijakan tersebut mempunyai sifat baru atau memperbaiki program dari kebijakan sebelumnya.

d) Tepat Lingkungan

Lingkungan yang menentukan efektivitas kebijakan yakni lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan terdiri dari interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan aktor kebijakan dengan lembaga lain yang berkaitan. Sementara itu, lingkungan eksternal kebijakan terdiri atas opini masyarakat, interpretasi institusi, dan individu.

e) Tepat Proses

Pada umumnya, implementasi kebijakan terdiri dari tiga proses, yaitu penerimaan kebijakan, adaptasi kebijakan, dan kesiapan strategi.

1.6.7 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan dapat diartikan sebagai pemulihan, mempertahankan, serta meningkatkan daya fungsi hutan dan lahan sehingga baik produktivitas, daya dukung maupun peranannya demi mencapai sistem kehidupan tetap terjaga. Pelaksanaan dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini mencakup dari reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, hingga penerapan Teknik konversasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis atas lahan.

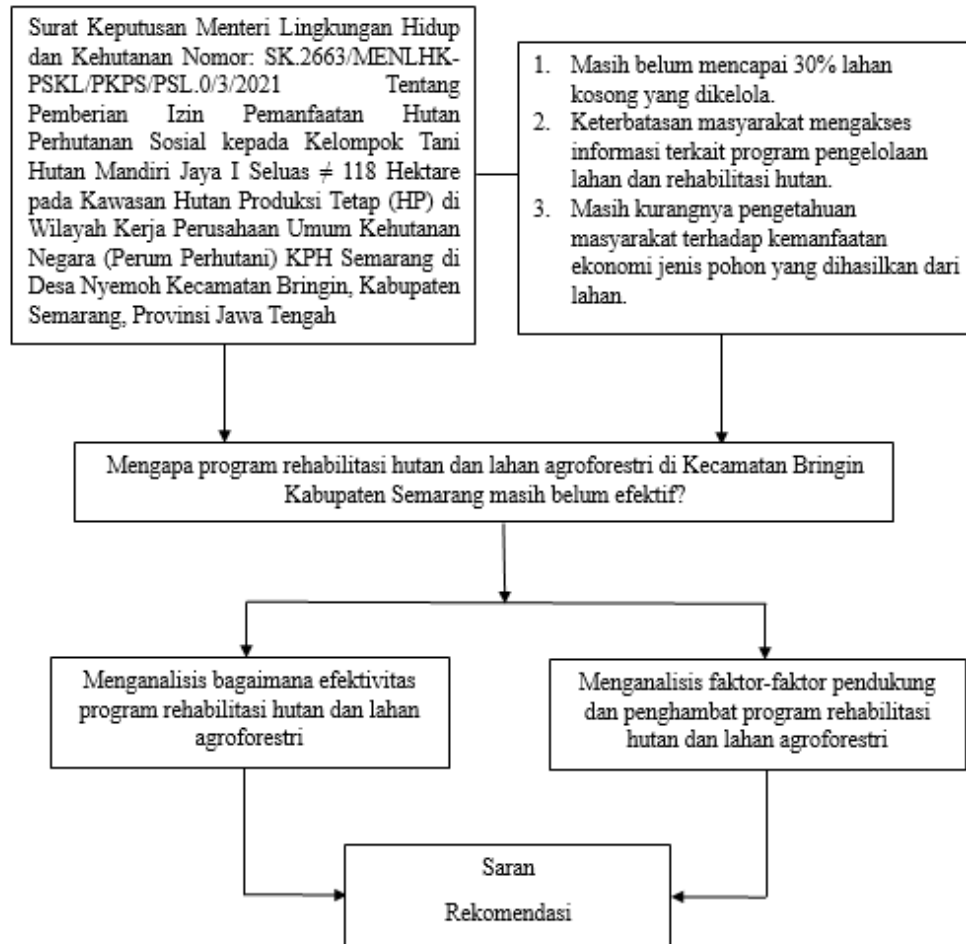
Menurut Wahono (2002:3) menyatakan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan adalah salah satu bentuk usaha yang berguna untuk memulihkan, memperbaiki serta meningkatkan kondisi lahan yang mengalami kerusakan guna berfungsi sebagaimana harusnya yakni sebagai unsur produksi media pengatur tata air, maupun unsur perlindungan alam beserta lingkungannya. Merujuk dari definisi yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk mengembalikan dan memulihkan fungsi dari sebuah lahan yang mana pengelolaannya mampu meningkatkan kondisi dari lahan yang mengalami kerusakan.

1.6.8 Agroforestri

Mengacu pada pengertian terkait agroforestri yang dikemukakan oleh Bidura (2017) menyatakan bahwa agroforestri diartikan sebagai sistem yang mampu mempertahankan ekosistem dan lingkungannya dimana merupakan suatu sistem tata guna lahan yang sifatnya terpadu bagi daerah-daerah marginal dengan usaha tani ataupun investasi yang minim, sehingga dasar pemikiran dari agroforestri sendiri memiliki dua faktor yaitu faktor biologis dan faktor sosial. Lalu, agroforestri juga dijelaskan sebagai solusi yang tepat untuk melakukan pemulihan fungsi hutan yang mana sistem pengelolaannya mengombinasikan tanaman pertanian dan tanaman kehutanan dengan suatu pengaturan jarak tanam yang bertujuan untuk mengurangi persaingan antara tanaman satu dengan lainnya (Figyantika et. Al (2020).

Pemahaman terkait agroforestri turut dijelaskan oleh Hadi Susilo, dkk (2009) yang mana menyatakan bahwa agroforestri merupakan hutan permanen yang memiliki tujuan pengawetan lingkungan dan memberikan kebaikan dari segi ekonomi bagi masyarakat setempat yang mana dapat diartikan bahwa di lahan tersebut ditanami oleh tanaman berpohon guna dapat memberikan manfaat yang baik dari segi ekologi maupun ekonomi. Mengacu dari beberapa definisi yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa agroforestri merupakan suatu sistem yang mempunyai tujuan untuk memulihkan fungsi hutan dengan melakukan penanaman pada lahan dengan tanaman pepohonan yang mempunyai nilai guna baik dari aspek ekologi maupun ekonomi bagi masyarakat.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian



1.8 Operasional Konsep

No	Fokus	Fenomena	Sub Fenomena
1.	Efektivas Program	Tepat Kebijakan	a. Kapabilitas program dalam menangani masalah yang tertera pada surat keputusan program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. b. Kesesuaian dengan karakter persoalan yang ada dalam program rehabilitasi hutan dan agroforestri.
		Tepat Target	a. Ketepatan lokasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri oleh BPDASHL Pemali Jratun. b. Tepat manfaat pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri terhadap bidang ekonomi. c. Pemilihan jenis pohon buah-buahan dan kayu disesuaikan dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri agar dapat memperbaiki kondisi lingkungan dan manfaat ekonomi.
		Tepat Proses	a. Penerimaan Proses kelompok tani hutan menerima kebijakan sebagai aturan dari BPDASHL Pemali Jratun. b. Adaptasi Kelompok tani hutan dapat beradaptasi dengan menyesuaikan proses rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri dan BPDASHL Pemali Jratun sebagai tugas yang harus dilaksanakan. c. Kesiapan Proses kelompok tani memiliki kesiapan untuk menjadi bagian dari program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri dan BPDASHL Pemali Jratun siap menjadi pelaksana kebijakan.

2.	Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat	Komunikasi	a. Wujud komunikasi yang dilakukan oleh pihak BPDASHL Pemali Jratun adalah melalui sosialisasi yang berisikan interaksi dan koordinasi pada kelompok tani hutan. b. BPDASHL Pemali Jratun secara konsisten memberikan informasi dan memberikan putusan terhadap persoalan yang ada pada program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri.
		Isi Kebijakan	a. Sumber daya yang dikerahkan adalah pemerintah mengerahkan staf melalui Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun untuk menyampaikan dan melaksanakan program bersama dengan kelompok tani hutan di Desa Nyemoh. b. Perubahan yang diharapkan dengan adanya program adalah masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. c. Kemanfaatan yang dihasilkan melalui pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri adalah kelompok tani dapat diperoleh dari bidang ekonomi.
		Sumber Daya	a. Bentuk dukungan oleh Balai Pengelola Daerah Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun untuk program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri adalah dengan memberikan bibit gratis. b. Keikutsertaan masyarakat Desa Nyemoh dengan membentuk kelompok tani hutan. c. Penggunaan lahan masyarakat sebagai bentuk dukungan dari masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan dengan baik lingkungan.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2009) mempunyai landasan yang merujuk pada filsafat *positivism* dan bisa digunakan untuk melakukan penelitian populasi atau jenis sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang sifatnya adalah kuantitatif dengan tujuan melakukan pengujian pada sebuah hipotesis yang telah direncanakan. Sugiyono turut menjabarkan bahwa metode penelitian deskriptif berguna untuk memecahkan maupun menjawab permasalahan yang terjadi. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan pengumpulan, klasifikasi, serta analisis atau pengelolaan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan memiliki tujuan utama sebagai penjelasan tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi. Pendekatan kuantitatif sendiri juga dijelaskan sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengukur indikator-indikator variabel penelitian, sehingga dapat diperoleh gambaran di antara variabel-variabel tersebut.

Menurut Surakhmad (2009) tujuan pendekatan kuantitatif yaitu untuk mengukur dimensi yang akan diteliti. Penggunaan metode deskriptif kuantitatif ini selaras dengan variabel penelitian yang memfokuskan pada fenomena yang sedang terjadi saat ini dengan bentuk hasil penelitian berbentuk angka-angka yang mempunyai makna. Metode penelitian deskriptif kuantitatif turut dijelaskan oleh Sudjana (2016) yakni metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif

dapat digunakan jika bertujuan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada saat ini dalam bentuk angka yang bermakna.

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif sebab dengan desain penelitian ini mampu memberikan gambaran, fakta-fakta, fenomena secara sistematis dan akurat terkait sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penggunaan metode ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang efektivitas program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Variabel penelitian ini adalah efektivitas program rehabilitasi hutan dan lahan dan bentuk variabelnya adalah variabel tunggal. Hal ini diartikan jika peneliti tidak perlu mencari pengaruh dan hubungan variabel lain akan tetapi bertujuan mendeskripsikan terkait efektivitas program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

1.9.2 Populasi dan Sampel

1.9.2.1 Populasi

Kata populasi berasal dari Bahasa Inggris yakni "*population*" yang diartikan sebagai jumlah penduduk. Pada sebuah penelitian, populasi sering kali digunakan untuk menyebutkan kelompok atau serumpun objek yang dijadikan sasaran penelitian, sehingga dijelaskan oleh Bungin (2013) bahwa populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek yang berupa manusia, tumbuhan, udara, hewan, peristiwa, gejala, nilai, sikap hidup dan lain sebagainya. Objek-objek yang disebutkan mampu digunakan sebagai sumber data penelitian. Populasi dalam

penelitian ini adalah anggota kelompok tani KTH Mandiri Jaya I pada tahun 2022 yaitu sebanyak 73 orang.

1.9.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Sugiyono (2016) sampel dijelaskan sebagai komponen dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota kelompok tani hutan Mandiri Jaya I yang berjumlah 73 orang.

1.9.3 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Erwan (2011) sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mengikuti prosedur tertentu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016) penggunaan *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang berasal dari pertimbangan data tertentu. Sampel yang dijadikan sasaran perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, sehingga peneliti menentukan kriteria sampling sebagai berikut:

1. Sampel merupakan anggota dari kelompok tani Hutan Mandiri Jaya I.
2. Mengikuti program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun.

1.9.4 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2018:47) suatu penelitian dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data yang didapatkan dari berbagai sumber. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan seorang yang dipilih untuk menjadi narasumber data atau responden. Dalam hal ini sumber data yang didapatkan terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan. Pada penelitian ini, data primer bisa diperoleh dari proses survei, observasi langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa penelitian terdahulu, literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi foto serta rekaman suara.

1.9.5 Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran skala likert dimana skala ini merupakan suatu skala psikometrika yang digunakan di dalam kuesioner dan merupakan skala yang paling sering digunakan pada suatu riset berupa survei. Metode yang dikembangkan oleh Rensis Likert ini dapat digunakan untuk pengukuran sikap, pendapat, serta persepsi seseorang atau suatu kelompok orang terhadap suatu program. Pada skala likert, responden diminta untuk memberikan tingkatan persetujuan terhadap efektivitas program dengan memilih salah satu dari

keseluruhan tingkatan jawaban yang tersedia. Tingkat kualitas tersebut diawali dengan sangat baik sampai dengan tidak baik. Penentuan skor dalam penelitian ini yaitu:

1. Jawaban “tidak setuju” diberi skor 1
2. Jawaban “kurang setuju” diberi skor 2
3. Jawaban “setuju” diberi skor 3
4. Jawaban “sangat setuju” diberi skor 4

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang terdapat di lapangan. Teknik pengumpulan data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner (angket) atau observasi.

a. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah Teknik pengumpulan data yakni melalui memberi responden pertanyaan tertulis kepada untuk diisi dengan jawaban. Kuesioner adalah teknik yang efisien karena peneliti dapat mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur, dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner atau angket yang diberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dapat terbuka maupun tertutup.

b. Observasi

Wawancara dan kuesioner mempunyai keterikatan erat dengan komunikasi Bersama responden, akan tetapi observasi sifatnya tidak terbatas dalam lingkup tersebut. Hal ini termasuk dengan interaksi objek-objek alam lainnya. Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan pada saat peneliti berinteraksi dengan perilaku manusia, suatu tahapan kerja, gejala-gejala alam dan juga ketika responden dianggap belum memenuhi kriteria benar.

c. Dokumentasi

Aktivitas pengumpulan data dapat dilaksanakan melalui cara menganalisis dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk mencari serta memperoleh data penunjang terkait dengan topik penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari literatur maupun dokumen atau hasil laporan yang mempunyai kaitan dengan persoalan yang diteliti oleh peneliti (Prastowo, 2011).

1.9.7 Instrumen Penelitian

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Purwanto (2011), instrumen penelitian merupakan instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data primer dari responden. Definisi dasar instrumen penelitian yakni instrumen penelitian memiliki kedudukan yang krusial dalam menjelaskan bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan data di lapangan. Pengertian mengenai instrumen penelitian lainnya dikemukakan oleh Bungin (2013) yakni instrumen

penelitian adalah bagian yang sulit dari keseluruhan tahapan penelitian dimana jika ditemukan kesalahan pada tahapan ini maka dipastikan seluruh penelitian gagal ataupun konsepnya dapat berubah.

Pada penelitian survei, instrumen penelitian berbentuk kuesioner yang mana terdapat dua variabel yaitu efektivitas sebagai variabel independen dan program rehabilitasi hutan dan lahan. Variabel selanjutnya yang digunakan untuk melihat kualitas instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

1.9.7.1 Uji Validitas

Uji validitas merujuk pada definisi Ghazali (2006) adalah instrumen yang berguna untuk menguji valid atau tidaknya sebuah kuesioner. Sebuah kuesioner dapat dianggap valid jika pertanyaan di dalam kuesioner mampu menjawab sesuatu yang akan diukur oleh peneliti. Pelaksanaan uji validitas ini dapat dilakukan melalui perbandingan nilai r hitung (*correlated item-total correlations*) dengan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung, r tabel dan bernilai negatif, maka pertanyaan dianggap tidak valid dan jika nilai r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif maka pertanyaan dari kuesioner tersebut mampu dianggap valid. Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas dengan menggunakan Microsoft Excel.

1.9.7.2 Uji Reliabilitas

Pada saat pengujian konsistensi kuesioner guna mengukur indikator dari variabel atau konstruksi dapat menggunakan uji reliabilitas. Kuesioner dianggap *reliable* atau handal apabila jawaban responden dari pertanyaan yang diberikan konsisten setiap waktunya. Pengukuran reliabilitas menurut Ghazali (2006) bisa

digunakan dengan menggunakan uji *statistic* Cronbach Alpa (α). Suatu variabel dapat dikatakan valid apabila memberikan nilai (α) $> 0,70$, oleh sebab itu penulis akan melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS Versi 24.

1.9.8 Metode Analisis Data

Setiap unsur di dalam survei masing-masing unsur diberikan nilai yang mana nilai dihitung menggunakan kategorisasi. Definisi kategorisasi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan setelah seluruh jawaban responden terkumpul. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan penilaian dari jawaban responden pada masing-masing indikator. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengukuran pada Tingkat interval yang ditentukan melalui rumus berikut:

$$1 = \frac{R}{K}$$

Keterangan:

1 = Lebar interval

R = Rentang (selisih antara skor tertinggi dan terendah)

K = Jumlah kelas

Pada tahapan berikutnya adalah menjumlahkan hasil skor dari total item pertanyaan yang berkaitan dengan indikator. Tahapan selanjutnya melakukan klasifikasi dengan menggunakan skala likert yang telah dibagi ke dalam empat kategori, yakni:

- a. Hasil jawaban kategori tidak setuju mendapatkan skor 1
- b. Hasil jawaban kategori kurang setuju mendapatkan skor 2
- c. Hasil jawaban kategori setuju mendapatkan skor 3
- d. Hasil jawaban kategori sangat setuju mendapatkan skor 4